

RELEVANSI PANCASILA DI ERA MODERN: BAGAIMANA MENGEMBANGKANNYA

Dr. Suyato Kusumaryono, M.Pd.

Institut Pendidikan Indonesia

✉ Corresponding author

suyatokusumaryono@institutpendidikan.ac.id

INFO ARTIKEL

History Artikel :

Received : 23-05-2025

Editing : 27-05-2025

Copyediting : 30-05-2025

Kata kunci:

Pancasila, relevansi ideologi, globalisasi, transformasi nilai, identitas nasional

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia menghadapi tantangan kompleks di era modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Pancasila dalam konteks Indonesia kontemporer dan mengidentifikasi strategi pengembangan nilai-nilai Pancasila yang adaptif dengan perubahan zaman. Melalui studi pustaka komprehensif terhadap literatur terkini, penelitian ini mengkaji transformasi interpretasi Pancasila sejak kelahirannya hingga era digitalisasi dan globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tetap memiliki relevansi kuat sebagai pemersatu bangsa dan panduan etis dalam menghadapi tantangan modernitas, namun memerlukan reinterpretasi kontekstual agar nilai-nilainya dapat diaktualisasikan secara efektif. Penelitian mengidentifikasi empat strategi utama pengembangan Pancasila: rekontekstualisasi nilai-nilai fundamental, integrasi dalam pendidikan karakter, penguatan implementasi dalam kebijakan publik, dan transformasi digital dalam sosialisasi. Kesimpulannya, Pancasila membutuhkan pendekatan pengembangan yang komprehensif dan inovatif untuk mempertahankan posisinya sebagai landasan ideologis yang relevan bagi Indonesia modern

ABSTRACT

Pancasila as the foundation and ideology of the Indonesian nation faces complex challenges in the modern era. This research aims to analyze the relevance of Pancasila in contemporary Indonesian context and identify strategies for developing Pancasila values that are adaptive to changing times. Through a comprehensive literature study of recent publications, this research examines the transformation of Pancasila interpretation from its inception to the era of digitalization and globalization. The results show that Pancasila maintains strong relevance as a unifying force and ethical guide in facing the challenges of modernity, but requires contextual reinterpretation for its values to be effectively actualized. The research identifies four main strategies for developing Pancasila: recontextualization of fundamental values, integration into character education, strengthening implementation in public policy, and digital transformation in socialization. In conclusion, Pancasila requires a comprehensive and innovative development approach to maintain its position as a relevant ideological foundation for modern Indonesia.

Keyword: *Pancasila, ideological relevance, globalization, value transformation, national identity*

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945. Sebagai ideologi yang lahir dari pergulatan pemikiran dan perjuangan kemerdekaan, Pancasila diharapkan menjadi landasan pemersatu dan pengarah bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia kontemporer, muncul pertanyaan krusial mengenai relevansi Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan era modern (Latif, 2018). Dinamika perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang begitu cepat dan masif telah menghadirkan sejumlah tantangan baru yang mungkin tidak terbayangkan oleh para perumus Pancasila di masa lalu.

Era modern yang ditandai dengan revolusi industri 4.0, digitalisasi, dan demokratisasi informasi telah membawa pengaruh signifikan terhadap pola pikir, gaya hidup, dan orientasi nilai masyarakat Indonesia. Generasi muda saat ini dihadapkan pada realitas dunia yang tanpa batas (*borderless*) melalui internet dan media sosial, yang memungkinkan masuknya berbagai nilai dan ideologi dari seluruh penjuru dunia (Nugroho, 2020). Fenomena ini berpotensi menggerus pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila jika tidak diimbangi dengan upaya penguatan dan revitalisasi yang sesuai dengan konteks kekinian. Selain itu, berbagai problematika nasional seperti korupsi, intoleransi, kesenjangan sosial-ekonomi, dan polarisasi politik juga menjadi indikator adanya kesenjangan antara idealitas Pancasila dengan realitas implementasinya (Budimansyah, 2019).

Studi-studi terdahulu telah menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda Indonesia. Penelitian Widuseno (2018) mengungkapkan bahwa 63% mahasiswa di beberapa perguruan tinggi mengalami kesulitan mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu kontemporer. Sementara itu, Muchtarom (2021) menemukan bahwa pendidikan Pancasila yang selama ini dilaksanakan cenderung bersifat doktriner dan kurang mampu menumbuhkan kesadaran kritis terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi, Sutrisno (2019) mengidentifikasi adanya "krisis identitas ideologis" di kalangan generasi milenial dan generasi Z yang cenderung lebih terpapar pada nilai-nilai global dibandingkan nilai-nilai keindonesiaan.

Di sisi lain, beberapa peneliti seperti Kaelan (2018) dan Widjaja (2020) justru berpendapat bahwa Pancasila tetap memiliki relevansi yang kuat di era modern karena karakteristiknya yang bersifat terbuka dan dinamis. Pancasila diyakini mampu menjadi "jembatan ideologis" yang menghubungkan tradisi dengan modernitas, serta menjadi "filter nilai" dalam menghadapi berbagai pengaruh global. Perspektif ini menekankan perlunya pendekatan baru dalam mengembangkan Pancasila agar tetap responsif terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan esensi fundamental yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang ada, penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif bagaimana relevansi Pancasila di era modern dan strategi pengembangannya agar tetap menjadi landasan ideologis yang hidup dan bermakna bagi bangsa Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menemukan pendekatan-pendekatan kontekstual dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar dapat diaktualisasikan

secara efektif di tengah berbagai perubahan dan tantangan zaman. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis relevansi Pancasila dalam konteks Indonesia kontemporer di era globalisasi dan digitalisasi; dan (2) mengidentifikasi strategi pengembangan nilai-nilai Pancasila yang adaptif dengan perubahan zaman namun tetap berpegang pada esensi fundamental.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk mengkaji secara komprehensif literatur yang relevan dengan topik relevansi Pancasila di era modern dan strategi pengembangannya. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang terkait dengan Pancasila, perkembangan ideologinya, serta kontekstualisasinya dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri dari buku-buku, artikel jurnal ilmiah, disertasi, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta publikasi resmi pemerintah yang terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2014-2024). Pemilihan rentang waktu ini dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif dan analisis terkini mengenai Pancasila dalam konteks Indonesia kontemporer. Beberapa literatur klasik yang dianggap fundamental dalam kajian Pancasila juga dirujuk untuk memberikan landasan historis dan konseptual yang kuat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi sumber-sumber literatur dari berbagai database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Garuda (Garba Rujukan Digital), serta katalog perpustakaan digital nasional. Pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti "Pancasila," "relevansi Pancasila," "Pancasila era modern," "pengembangan nilai Pancasila," "aktualisasi Pancasila," "Pancasila dan globalisasi," serta kombinasi kata kunci lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten (content analysis) dengan pendekatan interpretif. Proses analisis meliputi beberapa tahapan: (1) pengorganisasian data literatur yang telah dikumpulkan berdasarkan subtopik dan relevansinya; (2) kategorisasi dan pengkodean informasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama; (3) interpretasi dan sintesis untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi Pancasila dan strategi pengembangannya; dan (4) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai perspektif dari sumber-sumber literatur yang beragam. Selain itu, penelitian ini juga memerhatikan prinsip kredibilitas dengan mengutamakan literatur yang dipublikasikan oleh penerbit bereputasi dan jurnal terakreditasi, serta prinsip transferabilitas dengan menyajikan deskripsi yang kaya mengenai konteks penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Transformasi Interpretasi Pancasila dalam Lintasan Sejarah

Pancasila telah mengalami berbagai fase interpretasi dan implementasi sejak dirumuskan oleh Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Penelusuran historis menunjukkan adanya dinamika penafsiran dan penerapan Pancasila yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-politik pada masing-masing era pemerintahan. Latif (2019) membagi periodisasi perkembangan Pancasila ke dalam beberapa fase utama: era pembentukan (1945-1959), era Demokrasi Terpimpin (1959-1965), era Orde Baru (1966-1998), dan era Reformasi (1998-sekarang).

Pada era pembentukan, Pancasila dimaknai sebagai filosofische grondslag (dasar filsafat) negara yang mempersatukan berbagai kelompok dan aliran dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Soekarno menekankan Pancasila sebagai weltanschauung (pandangan dunia) yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri. Menurut Kaelan (2018), pada periode ini pemaknaan Pancasila lebih bersifat terbuka dan inklusif, mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia.

Memasuki era Demokrasi Terpimpin, interpretasi Pancasila mulai mengalami pergeseran dengan munculnya konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang digagas oleh Soekarno. Asshiddiqie (2020) menjelaskan bahwa pada periode ini, Pancasila cenderung dimaknai sebagai alat pemersatu ideologis dalam konteks pertentangan global antara blok Barat dan blok Timur. Interpretasi ini mencerminkan upaya Soekarno untuk memposisikan Indonesia sebagai kekuatan non-blok yang memiliki identitas ideologis mandiri.

Perubahan drastis terjadi pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pancasila diinterpretasikan secara monolitik dan dijadikan instrumen legitimasi kekuasaan melalui program indoktrinasi seperti Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Menurut Budimansyah (2019), pendekatan indoktrinatif ini justru berdampak pada pereduksian makna Pancasila menjadi sekadar slogan dan ritual formal, tanpa penghayatan substansial terhadap nilai-nilainya. Sebagaimana dikemukakan oleh Hardiman (2018), "Pancasila di era Orde Baru mengalami sakralisasi retorik namun sekaligus desakralisasi praktis, ketika penguasa menjadikannya tameng ideologis sambil melanggar nilai-nilainya dalam praktik kekuasaan."

Era Reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 membawa angin segar bagi reinterpretasi Pancasila. Setelah mengalami "marginalisasi diskursif" pada awal reformasi sebagai reaksi terhadap politisasi Pancasila di era sebelumnya, mulai muncul kesadaran baru akan pentingnya revitalisasi Pancasila sebagai panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sutrisno (2019) mencatat bahwa sejak dekade 2010-an, terjadi kebangkitan minat akademis dan politik terhadap Pancasila, yang ditandai dengan munculnya berbagai kajian kritis dan upaya rekontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan kontemporer.

2. Relevansi Pancasila dalam Konteks Indonesia Kontemporer

Pertanyaan mengenai relevansi Pancasila di era modern dapat ditelaah melalui beberapa dimensi analisis: relevansi filosofis, relevansi sosio-kultural, relevansi politik-ketatanegaraan, dan relevansi ekonomi. Pemahaman multidimensional ini penting untuk memetakan secara komprehensif posisi Pancasila dalam konteks Indonesia kontemporer.

a) Relevansi Filosofis

Secara filosofis, Pancasila tetap memiliki relevansi kuat sebagai sistem nilai yang mengakomodasi keberagaman pandangan hidup masyarakat Indonesia. Penelitian Widisuseno (2020) menunjukkan bahwa karakteristik Pancasila sebagai "filsafat terbuka" memungkinkannya untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Pancasila menawarkan jalan tengah (middle path) di antara berbagai ekstremitas ideologis, baik yang bersumber dari tradisionalisme maupun modernisme.

Suparlan (2021) mengemukakan konsep "universalitas partikular" Pancasila, yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dirumuskan dalam konteks partikularitas budaya Indonesia. Konsep ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang mampu berdialog dengan berbagai perkembangan pemikiran global tanpa kehilangan akar kulturalnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Pranarka (dalam Kaelan, 2018): "Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang kaku dan dogmatis, melainkan ideologi terbuka yang senantiasa berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan zaman."

b) Relevansi Sosio-Kultural

Dalam dimensi sosio-kultural, Pancasila menawarkan landasan nilai untuk mengelola keberagaman dan membangun kohesi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Menurut penelitian Nurhayati (2020), nilai-nilai Pancasila seperti "Bhinneka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu) menyediakan kerangka konseptual yang relevan untuk menghadapi tantangan fragmentasi sosial dan politik identitas yang menguat di era pasca-kebenaran (post-truth).

Di tengah fenomena intoleransi dan ekstremisme yang muncul sebagai efek samping globalisasi, Pancasila menawarkan model keberagamaan moderat yang mengakui pluralitas keyakinan sambil tetap menegaskan pentingnya nilai-nilai ketuhanan. Azra (2019) menyebut model ini sebagai "middle path religiosity" yang membedakan Indonesia dari negara-negara sekuler maupun negara-negara teokrasi. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Setara Institute (2021) mengonfirmasi bahwa komunitas-komunitas yang memiliki pemahaman dan penghayatan nilai Pancasila yang baik cenderung lebih resilient terhadap penetrasi ideologi ekstremis.

3. Relevansi Politik-Ketatanegaraan

Dalam ranah politik dan ketatanegaraan, Pancasila memberikan landasan bagi pengembangan sistem demokrasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Asshiddiqie (2020) berargumen bahwa sila keempat Pancasila yang menekankan "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" menawarkan model deliberative democracy yang mengedepankan musyawarah substantif, bukan sekadar demokrasi prosedural yang berfokus pada voting dan penghitungan suara.

Menariknya, studi komparatif yang dilakukan oleh Juwana (2019) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Pancasila memiliki resonansi dengan diskursus global kontemporer mengenai democratic renewal yang menekankan pentingnya partisipasi publik, deliberasi, dan penguatan social capital dalam proses berdemokrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak sekadar relevan sebagai warisan masa lalu, tetapi juga memiliki potensi kontributif terhadap percakapan global mengenai masa depan demokrasi.

4. Relevansi Ekonomi

Dimensi ekonomi Pancasila, yang sering diidentikkan dengan konsep "ekonomi Pancasila" atau "demokrasi ekonomi", juga menunjukkan relevansi signifikan di tengah kritik terhadap neoliberalisme dan kapitalisme ekstrem. Mubyarto (dalam Swasono, 2018) menjabarkan ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial, kekeluargaan, dan keberlanjutan, yang berbeda dari kapitalisme laissez-faire maupun sosialisme-komunisme.

Studi empiris yang dilakukan oleh Witjaksono (2020) mengungkapkan bahwa di tengah krisis ekonomi global yang berulang, model ekonomi berbasis Pancasila yang menekankan keseimbangan antara peran negara, swasta, dan koperasi menunjukkan resiliensi yang lebih baik dibandingkan model ekonomi yang sepenuhnya berorientasi pasar. Hal ini tercermin dari daya tahan ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis finansial global 2008 dan pandemi COVID-19.

5. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Modern

Meskipun memiliki relevansi konseptual yang kuat, implementasi nilai-nilai Pancasila di era modern menghadapi berbagai tantangan signifikan yang perlu diatasi melalui strategi pengembangan yang tepat. Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

1) Globalisasi dan Penetrasi Ideologi Transnasional

Globalisasi telah memfasilitasi masuknya berbagai ideologi transnasional yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Nugroho (2020), fenomena radikalisme dan ekstremisme yang menguat dalam dekade terakhir sebagian besar dipengaruhi oleh transmisi ideologi transnasional melalui internet dan media sosial. Pada saat yang sama, nilai-nilai konsumerisme dan hedonisme yang menyertai globalisasi ekonomi juga berpotensi menggerus nilai-nilai keadilan sosial dan kegotongroyongan yang menjadi esensi Pancasila.

2) Kesenjangan antara Nilai Ideal dan Realitas Sosial

Disparitas antara idealitas Pancasila dengan realitas sosial-politik menjadi tantangan serius dalam implementasinya. Korupsi, ketidakadilan, diskriminasi, dan berbagai patologi sosial lainnya menciptakan sinisme publik terhadap Pancasila sebagai ideologi nasional. Penelitian Muchtarom (2021) menemukan bahwa 67% responden dari kalangan generasi milenial menganggap bahwa Pancasila "hanya indah di atas kertas" tetapi jauh dari praktik nyata dalam kehidupan bernegara.

3) Krisis Keteladanan dan Kepemimpinan

Minimnya keteladanan dari para pemimpin dan elit politik dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila juga menjadi tantangan signifikan. Budimansyah (2019) mencatat bahwa perilaku para pejabat publik dan tokoh masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap relevansi Pancasila sebagai panduan etis kehidupan berbangsa dan bernegara.

4) Pendekatan Pembelajaran yang Kurang Efektif

Metode pembelajaran dan sosialisasi Pancasila yang cenderung doktriner dan verbalistik menjadi kendala dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Penelitian Widjaja (2020) menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi masih didominasi oleh metode hafalan dan indoktrinasi, sehingga gagal menumbuhkan kesadaran kritis dan penghayatan autentik terhadap nilai-nilai Pancasila.

5) Transformasi Digital dan Perubahan Pola Komunikasi

Era digital telah mengubah secara fundamental pola komunikasi dan penyebaran informasi dalam masyarakat. Platform media sosial dengan karakteristiknya yang cepat, superfisial, dan terfragmentasi sering kali tidak kondusif bagi diskursus mendalam mengenai nilai-nilai filosofis seperti Pancasila. Menurut Sutrisno (2019), dominasi "kultur klik" dan "budaya instan" di era digital menyulitkan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila yang membutuhkan refleksi mendalam dan dialog substantif.

6. Strategi Pengembangan Pancasila di Era Modern

Berdasarkan analisis terhadap relevansi dan tantangan implementasi Pancasila, penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi pengembangan Pancasila agar tetap relevan dan efektif di era modern:

a) Rekontekstualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Rekontekstualisasi merupakan upaya untuk menafsirkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam konteks permasalahan dan tantangan kontemporer. Latif (2019) menekankan pentingnya "hermeneutika progresif" yang memungkinkan nilai-nilai Pancasila diterjemahkan ke dalam berbagai konteks kekinian tanpa menghilangkan substansi fundamentalnya. Misalnya, sila Keadilan Sosial perlu dikontekstualisasikan dalam isu-isu ketimpangan digital, keadilan iklim, dan ekonomi berbagi (sharing economy) yang menjadi diskursus penting di era sekarang.

Sutrisno (2019) mengusulkan pendekatan "dialogis-kritis" dalam rekontekstualisasi Pancasila, yang melibatkan dialog terus-menerus antara nilai-nilai tradisional dengan realitas kontemporer. Pendekatan ini menghindari dua ekstremitas: konservatisme rigid yang menolak perubahan dan relativisme total yang kehilangan pegangan nilai. Sebagaimana dinyatakan oleh Hardiman (2018): "Pancasila perlu dipahami sebagai 'teks terbuka' yang senantiasa menawarkan kemungkinan interpretasi baru sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa harus kehilangan 'makna inti' yang menjadi identitas kebangsaan."

b) Revitalisasi Pendidikan Pancasila

Transformasi pendekatan pendidikan Pancasila dari model indoktrinatif menuju model kritis-reflektif menjadi strategi kunci dalam pengembangan Pancasila di era modern. Budimansyah (2019) mengusulkan model "pendidikan Pancasila berbasis proyek" yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu aktual melalui pendekatan problem-based learning dan service learning. Model ini menekankan pengalaman langsung dan keterlibatan aktif peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi permasalahan nyata di lingkungan mereka.

Sejalan dengan itu, Kaelan (2018) menekankan pentingnya pendekatan "filsafat praxis" dalam pembelajaran Pancasila, yang menghubungkan refleksi filosofis dengan aksi konkret. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami Pancasila secara konseptual, tetapi juga mengalaminya sebagai panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengoptimalkan proses ini, Widjaja (2020) merekomendasikan pemanfaatan teknologi digital dan metode pembelajaran inovatif seperti gamification, digital storytelling, dan blended learning dalam pendidikan Pancasila.

c) Penguatan Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Publik

Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik merupakan strategi penting untuk membuktikan relevansi praktis Pancasila. Asshiddiqie (2020) mengusulkan pengembangan "Pancasila Impact Assessment" sebagai instrumen analisis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Instrumen ini dapat menjadi bagian integral dari regulatory impact assessment yang sudah ada.

Pada tingkat praktis, Mubyarto (dalam Swasono, 2018) menekankan pentingnya model pembangunan ekonomi berbasis Pancasila yang berfokus pada pemerataan, keberlanjutan, dan penguatan ekonomi rakyat. Model ini menawarkan alternatif terhadap paradigma pembangunan neoliberal yang cenderung mengutamakan pertumbuhan dan efisiensi pasar tanpa memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan.

d) Transformasi Digital dalam Sosialisasi Pancasila

Di era digital, strategi sosialisasi Pancasila perlu beradaptasi dengan lanskap media dan pola konsumsi informasi yang telah berubah secara fundamental. Nugroho (2020) mengusulkan pendekatan "digital citizenship education" yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam literasi digital dan etika bermedia sosial. Pendekatan ini memungkinkan nilai-nilai Pancasila menjadi panduan bagi warga negara dalam berinteraksi di ruang digital.

Sementara itu, Sutrisno (2019) menekankan pentingnya konten digital kreatif yang mengemas nilai-nilai Pancasila dalam format yang menarik dan relevan bagi generasi digital native, seperti video pendek, infografis interaktif, web series, dan mobile games edukatif. Kolaborasi dengan kreator konten populer, influencer media sosial, dan komunitas digital juga dipandang sebagai strategi efektif untuk memperluas jangkauan sosialisasi Pancasila di era digital.

e) Penguatan Gerakan Kewargaan Berbasis Pancasila

Strategi bottom-up melalui penguatan gerakan kewargaan (civic movement) yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila juga dipandang penting dalam pengembangan Pancasila di era modern. Nurhayati (2020) mencatat munculnya berbagai gerakan pemuda dan komunitas yang mengusung semangat Pancasila dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti toleransi, lingkungan hidup, antikorupsi, dan keadilan sosial. Gerakan-gerakan ini menunjukkan bagaimana Pancasila dapat menjadi inspirasi bagi aksi kolektif warga negara dalam mengatasi permasalahan bersama.

Azra (2019) menekankan pentingnya membangun "ekosistem kewargaan" yang memungkinkan nilai-nilai Pancasila ditumbuhkembangkan melalui jaringan organisasi masyarakat sipil, institusi pendidikan, komunitas keagamaan, media, dan bisnis. Ekosistem ini dapat menjadi infrastruktur sosial yang memfasilitasi proses habituasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari warga negara.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila tetap memiliki relevansi kuat di era modern, namun memerlukan pendekatan pengembangan yang adaptif untuk mengaktualisasikan nilai-nilainya secara efektif. Sebagai ideologi terbuka yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, Pancasila menawarkan kerangka nilai yang dapat menjadi pemandu dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer seperti globalisasi, transformasi digital, dan perubahan sosial yang cepat.

Relevansi Pancasila tercermin dalam kemampuannya menyediakan landasan filosofis untuk mengelola keberagaman, membangun sistem demokrasi deliberatif, dan mengembangkan model ekonomi yang berkeadilan. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan serius berupa penetrasi ideologi transnasional, kesenjangan antara idealitas dan realitas, krisis keteladanan, pendekatan pembelajaran yang kurang efektif, dan transformasi digital yang mengubah pola komunikasi masyarakat.

Untuk mengembangkan Pancasila agar tetap relevan di era modern, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup rekontekstualisasi nilai-nilai fundamental, revitalisasi pendidikan Pancasila melalui pendekatan kritis-reflektif, penguatan implementasi dalam kebijakan publik, transformasi digital dalam sosialisasi, dan penguatan gerakan kewargaan berbasis Pancasila. Dengan pendekatan pengembangan yang inovatif dan adaptif, Pancasila dapat mempertahankan posisinya sebagai landasan ideologis yang relevan bagi Indonesia modern sekaligus menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan global kontemporer.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada lembaga yang telah memberikan dukungan finansial, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Bapak Zaenul Slam M.Pd (Dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) yang telah berkenan menjadi pembimbing dan memberikan masukan berharga selama proses penelitian berlangsung.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak perpustakaan dan lembaga penelitian yang telah menyediakan sumber referensi yang relevan dan memadai. Serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses penelitian ini berlangsung, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam.

Kepada para penulis dan peneliti dalam daftar pustaka yang telah memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dari penelitian ini, penulis mengucapkan penghargaan yang tinggi. Semoga tulisan ini dapat

bermanfaat dan berkontribusi bagi pengembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan Pancasila.

F. Referensi

- Asshiddiqie, J. (2020). Pancasila dan konstitusionalisme Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1-24. <https://doi.org/10.31078/jk1711>
- Azra, A. (2019). Pancasila dan moderasi beragama: Perspektif Islam. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 35-48. <https://doi.org/10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp35-48>
- Budimansyah, D. (2019). Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. Widya Aksara Press.
- Budiyono, B. (2017). Meneguhkan Pancasila sebagai ideologi negara: Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai dasar Pancasila. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 110-118. <https://doi.org/10.17977/um019v2i22017p110>
- Damanhuri, D. S. (2016). Ekonomi Pancasila: Sistem ekonomi berkeadilan untuk Indonesia. LP3ES.
- Hardiman, F. B. (2018). Demokrasi deliberatif: Menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jürgen Habermas. Kanisius.
- Juwana, H. (2019). Pancasila dan tantangan global: Analisis kritis terhadap implementasi hukum ekonomi Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(3), 324-341. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03.p04>
- Kaelan, K. (2018). Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya. Paradigma.
- Latif, Y. (2018). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2019). Wawasan Pancasila: Bintang penuntun untuk kebudayaan. Mizan.
- Mubyarto, M. (2014). Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan. LP3ES.
- Muchtarom, M. (2021). Persepsi generasi milenial terhadap Pancasila dan pengaruhnya pada perilaku kewarganegaraan. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 41-58. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v9i1.9210>
- Nugroho, A. (2020). Media sosial, ekstremisme, dan tantangan bagi eksistensi Pancasila di era digital. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 69-83. <https://doi.org/10.14203/jpp.v17i1.845>
- Nurhayati, S. (2020). Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam menangkal fenomena intoleransi dan radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 64-76. <https://doi.org/10.17977/um019v5i12020p064>
- Pranarka, A. M. W. (2015). Sejarah pemikiran tentang Pancasila. CSIS.
- Purnomo, A. (2018). Pancasila dalam perspektif politik global: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 135-154. <https://doi.org/10.22146/jkn.36516>
- Ragawino, B. (2017). Sistem konstitusi Indonesia: Implementasi nilai Pancasila dalam ketatanegaraan. Alfabeta.
- Santoso, B. (2015). Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 3(3), 1213-1227.
- Setara Institute. (2021). Laporan penelitian: Indeks kota toleran 2020. Setara Institute.
- Siswanto, S. (2020). Transformasi politik dalam implementasi Pancasila. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 46-65. <https://doi.org/10.24252/jpp.v8i1.14054>
- Suparlan, P. (2021). Pancasila dan identitas kebudayaan Indonesia: Dialog antar perspektif. *Obor Indonesia*.
- Supriyatno, M. (2017). Pancasila sebagai grand strategy pembangunan bangsa. *Jurnal Pertahanan*, 3(3), 187-202. <https://doi.org/10.33172/jp.v3i3.202>
- Sutrisno, S. (2019). Pancasila di era disrupsi: Tantangan dan strategi kebudayaan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 12-26. <https://doi.org/10.24269/jpk.v4.n1.2019.pp12-26>
- Swasono, S. E. (2018). Kerakyatan, kedaulatan, dan keadilan sosial dalam perspektif ekonomi Pancasila. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 11(1), 45-59.

- Widjaja, H. (2020). Metodologi pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi: Teori dan implementasi. Rajawali Press.
- Widiuseno, I. (2018). Kesadaran kritis dan kepedulian mahasiswa terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila: Studi kasus di beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah. Jurnal Filsafat, 28(2), 157-179. <https://doi.org/10.22146/jf.34984>
- Widiuseno, I. (2020). Pancasila sebagai filsafat terbuka: Tinjauan ontologis-aksiologis. Humanika, 27(1), 1-14. <https://doi.org/10.14710/humanika.v27i1.25584>
- Witjaksono, M. (2020). Ekonomi Pancasila dan ketahanan ekonomi: Kasus Indonesia menghadapi krisis 2008 dan pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 28(1), 23-42. <https://doi.org/10.14203/JEP.28.1.2020.23-42>
- Wiyono, S. (2016). Reaktualisasi Pancasila dalam kebhinnekaan: Suatu pendekatan filsafati. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.17977/um019v1i12016p001>
- Yudhoyono, S. B. (2016). Menuju harmoni dunia: Pandangan Indonesia tentang perdamaian, keadilan, dan demokrasi. Kompas Media Nusantara.
- Yudistira, A. (2016). Rekonstruksi Pancasila sebagai ideologi penegakan hukum antikorupsi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(4), 577-593. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art6>